

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji peran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2024, adanya kesenjangan antara regulasi dan komitmen untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas dengan implementasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai kendala, sehingga partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum maksimal. Penelitian ini terdapat dua permasalahan yang dikaji, pertama adalah bagaimana strategi KIP Kabupaten Aceh Tamiang dalam memastikan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, dan yang kedua apa saja kendala yang dihadapi KIP Kabupaten Aceh Tamiang dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Perspektif teoritik yang digunakan dalam studi ini adalah Partisipasi politik. Perspektif ini menempatkan hubungan dalam proses pemilihan pemimpin serta turut adil baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode pengumpulan data dilakukan secara etnografis yaitu melalui observasi dan wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Temuan ini menunjukkan bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan berbagai upaya strategis, termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas fisik dan non-fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta sosialisasi dan simulasi untuk penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan. Kendala tersebut meliputi kurangnya fasilitas yang sepenuhnya ramah disabilitas di beberapa TPS, informasi yang belum sepenuhnya dapat diakses (misalnya ketiadaan surat suara Braille yang merata), masalah privasi saat pencoblosan bagi pemilih yang membutuhkan pendampingan, serta stigma sosial yang masih menghambat partisipasi mereka.

Kata Kunci: Pilkada, Hak Politik, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

This thesis examines the role of the Independent Election Commission (KIP) of Aceh Tamiang Regency in fulfilling the political rights of persons with disabilities during the 2024 regional elections. It highlights the gap between regulations and the commitment to meet the political rights of persons with disabilities, as the implementation on the ground still faces various challenges, resulting in their participation in the regional elections not being maximized. The research addresses two main issues: first, how the KIP of Aceh Tamiang Regency strategizes to ensure the political rights of persons with disabilities in the 2024 regional elections; and second, what challenges the KIP faces in fulfilling these rights. The theoretical perspective used in this study is political participation, which emphasizes the relationship in the process of electing leaders and ensuring fairness both directly and indirectly. Data collection was conducted ethnographically through observations, in-depth interviews, and document studies. The findings indicate that the KIP of Aceh Tamiang Regency has undertaken various strategic efforts, including providing physical and non-physical accessibility facilities at polling stations (TPS), as well as socialization and simulations for persons with disabilities to raise awareness. However, the implementation on the ground still encounters significant challenges. These challenges include a lack of fully disability-friendly facilities at several polling stations, information that is not entirely accessible (such as the absence of Braille ballots in sufficient quantities), privacy issues during voting for voters who require assistance, and social stigma that continues to hinder their participation.

Keywords: Pilkada, Political Rights, Persons with Disabilities

